

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia penyandang disabilitas mempunyai berbagai hak yang dijamin undang-undang. Diantaranya dengan pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan UU No 11 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa hak bagi penyandang disabilitas. Secara garis besar penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Diantaranya adalah hak untuk menikmati kehidupan yang layak, senormal dan sepełuh mungkin, berhak atas upaya-upaya yang dirancang untuk membuatnya menjadi mandiri. Penyandang disabilitas juga berhak atas jaminan ekonomi dan sosial dan atas tingkat kehidupan yang layak meskipun semuanya tergantung pada kemampuannya. Hak ini didefinisikan sebagai hak untuk mendapatkan dan memperoleh pekerjaan atau terlibat dalam pekerjaan yang berguna, produktif, dan menghasilkan penghasilan, serta untuk bergabung dengan serikat pekerja. Hak yang lain adalah agar kebutuhan khusus penyandang disabilitas menjadi pertimbangan dalam setiap tingkatan perencanaan ekonomi dan sosial. Selain itu juga hak untuk hidup dengan keluarga atau orang tua angkat mereka dan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial, kreatif, atau rekreasi. Hak-hak ini diatur dalam *Unofficial Translation* Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975. Hak-hak tersebut juga diakomodir dalam Undang – Undang No.4 Tahun 1997 Tentang

Penyandang Cacat dan PP No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, diatur bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas mental; penyandang disabilitas fisik dan mental. Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat, penyandang disabilitas: berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

Khusus di Propinsi DIY pada tahun 2012 telah diterbitkan Perda DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 1 Perda DIY No 4 Tahun 2012 ini diberikan pengertian bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial. Berkaitan dengan pemberdayaan Pasal 26 Perda DIY No 4 Tahun 2012 mengatur bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri dan berkelanjutan.

Kenyataannya di Kabupaten Bantul yang banyak penduduknya tiba-tiba menjadi penyandang disabilitas namun masih terdapat permasalahan berkaitan dengan pemenuhan hak pemberdayaan. Masih banyak dijumpai penyandang disabilitas yang dengan keterbatasannya

harus bersaing dengan penduduk normal lainnya dalam rangka penggunaan pemenuhan hak untuk hidup mandiri, memenuhi kebutuhan ekonomi, eksistensi diri dan pengembangan potensi diri. Sementara undang-undang telah mengamanatkan bahwa para penyandang disabilitas berhak atas pemberdayaan. Hak tersebut dijamin undang-undang dan menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantul. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian dan penyelesaian dari berbagai pihak yang terkait agar tidak terjadi diskriminasi hak-hak penyandang disabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul setelah terbitnya Perda DIY No 4 Tahun 2012.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kendala pelaksanaan pemenuhan hak pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul?
2. Upaya apakah yang ditempuh para pihak dalam rangka pemenuhan hak pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul setelah terbitnya Perda DIY No 4 Tahun 2012?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemenuhan hak pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul
2. Upaya para pihak dalam rangka pemenuhan hak pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul setelah terbitnya Perda DIY No 4 Tahun 2012

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan dan upaya para pihak dalam rangka pemenuhan hak pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide-ide bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

B. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penilaian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan meneliti asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, dan sistematika hukum.

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

1) Merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung bidang penelitian

a) Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang meliputi:

(1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan

(2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian, dan lain-lain

b) Sarana dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bidang-bidang yang diteliti

b. Penelitian Lapangan

- 1) Merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan, memilih obyek penelitian tertentu yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti
- 2) Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari masyarakat atau perilaku masyarakat secara langsung
- 3) Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bantul
- 4) Subyek penelitian

Subyek yang diharapkan dapat memberi keterangan sebagai data dalam penelitian ini adalah responden yaitu Kepala Kantor Dinas Sosial, Kabupaten Bantul dan Yayasan Mandiri Craft yang bergerak di bidang perlindungan dan pendampingan penyandang disabilitas

- 5) Sarana dalam penelitian ini adalah wawancara langsung (*depth-interview*)

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan berdasarkan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan kemudian dari pedoman tersebut dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk memperoleh keterangan secara lengkap dan menyeluruh.

3. Metode analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis data yang tidak mendasarkan pada angka-angka atau *statistik*, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian akan disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian. Metode berpikir yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah induktif yaitu metode berpikir untuk

